

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**Wanda Marlin<sup>1</sup>, Alexandra Hukom<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Universitas Palangka Raya

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : September 15th, 2022

Revised : December 20<sup>th</sup>, 2022Accepted : January 5<sup>th</sup>, 2023**Keywords:***Fiscal Independence – Fiscal Decentralization – Employment Absorption – Central Kalimantan Province)***Kata Kunci:***Kemandirian Fiskal, Desentralisasi Fiskal, Penyerapan Tenaga Kerja, Provinsi Kalimantan Tengah*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of partial degree of Fiscal Independence and degree of Fiscal Decentralization on Labor Absorption in Central Kalimantan Province. The method used in this study is explanatory research where to test the hypothesis between the hypothesized variables, this study uses secondary data. The results of the Multiple Linear Regression analysis of the Semi Logarithma or Lin-Log model obtained the results of the analysis that can be concluded that partially the Degree of Fiscal Independence (DKF) has no effect on Labor Absorption, while the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) has a significant effect on Labor Absorption in Kalimantan While simultaneously the Degree of Fiscal Independence (DKF) and the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) have a significant influence on Labor Absorption in Central Kalimantan.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Derajat Kemandirian Fiskal dan Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanasi (explanatory research) dimana untuk menguji hipotesis antara variabel yang dihipotesiskan, penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil analisis Regresi Linier Berganda Model Semi Logarithma atau Lin-Log diperoleh hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu secara parsial Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sementara itu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah sedangkan secara simultan Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah.

<sup>\*</sup>Corresponding author :

Address : Palangka Raya, Indonesia

E-mail : wandamarlin5@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, seiring dengan perubahan dinamika sosial politik Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah otonom sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk menumbuh kembangkan pembangunan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tersebut maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya yang sah, ditambah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 berupa Dana Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. "Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab", (Widjaja, 2001).

Besar kecilnya PAD dan Dana Perimbangan ini menentukan Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) yang merupakan rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan rasio antara Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah yang tertuang dalam APBD, sangat penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan inti diantaranya peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006). Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu termasuk didalamnya ialah pengembangan lapangan pekerjaan yang ada di masing masing daerah Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia, (Depnakertrans, 2004). demikian pembangunan ekonomi yang didukung oleh pembiayaan yang berasal dari APBD sebagai wujud dari kemandirian dan desentralisasi fiskal dapat memperluas penyerapan tenaga kerja termasuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berpotensi untuk berkembang dan

menciptakan lapangan kerja dilihat dari kemampuan keuangan dan potensi daerah sendiri berupa PAD (Kemandirian Fiskal atau sering disebut Derajat Kemandirian Fiskal atau DKF) ditambah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (Desentralisasi Fiskal atau sering disebut Derajat Desentralisasi Fiskal atau DDF). Sebagai gambaran berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir 2015-2019 keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Derajat Kemandirian Fiskal (DKF), Dana Perimbangan, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Pendapatan Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Pendapatan Daerah Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Selama Tahun 2015-2019

Tahun	P A D (Ribu Rp)	Dana Perimbangan (Ribu Rp)	Pendapatan Daerah (Ribu Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
2015	1.174.969.267	1.673.376.687	3.252.747.364	1.193.171
2016	1.158.360.857	2.357.667.494	3.252.747.364	1.214.681
2017	1.342.330.618	2.728.245.370	3.548.504.589	1.222.707
2018	1.616.521.660	3.037.932.303	4.678.157.676	1.301.002
2019	1.784.877.436	3.178.430.284	4.999.819.209	1.327.885

Sumber : BPS, Kalimantan Tengah Dalam Angka Berbagai Edisi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang cenderung terus menerus naik dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.174.969,267 juta, dengan angka kemandirian (DKF) yang diperoleh dengan cara membagi PAD dengan Pendapatan Daerah pada masing-masing tahun dimana untuk tahun 2015 sebesar 36,12; namun menurun pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.158.360,857 juta, dengan angka kemandirian (DKF) sebesar 35,61; pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 1.342.330,618 juta, dengan angka kemandirian (DKF) sebesar 37,83; terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp.1.784.877,436 juta dengan angka kemandirian (DKF) sebesar 35,70. Sementara itu Dana Perimbangan tampaknya terus meningkat selama 5 tahun terakhir ini, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.673.376,687 juta, dengan angka desentralisasi (DDF) yang diperoleh dengan cara membagi Dana Perimbangan dengan Pendapatan Daerah pada masing-masing tahun dimana untuk tahun 2015 sebesar 51,45; pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 2.357.667,494 juta, dengan angka desentralisasi (DDF) sebesar 72,48; pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 2.728.245,370 juta, dengan angka desentralisasi (DDF) sebesar 76,88; terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp. 3.178.430,284 juta dengan angka desentralisasi (DDF) sebesar 63,57. Sedangkan penyerapan Tenaga Kerja pada periode tahun yang sama juga menunjukkan peningkatan yang terus menerus, dimana pada tahun 2015 sebanyak 1.193.171 orang; pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.214.681 orang; pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.222.707 orang; terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 1.327.885 orang.

## II. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Sesuai dengan amat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dimana pada otonomi daerah terdapat pembagian kekuasaan dalam suatu negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyerahan sebagian fungsi-fungsi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan mempercepat proses pemerataan distribusi pendapatan. Menurut Soetrisno, (2002) bahwa : Pemberian otonomi kepada daerah akan tidak banyak maknanya bagi pembangunan daerah apabila tidak diikuti dengan pembaruan pada system pembiayaan pembangunan yang sekarang ini berlaku di Negara kita.

### **Permintaan Tenaga Kerja**

Sukirno (2000) Permintaan keatas tenaga kerja merupakan permintaan tak langsung atau derive demand, maksudnya tenaga kerja diperkerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam menghasilkan barang-barang yang akan mereka jual. Dengan demikian permintaan ke atas tenaga kerja sangat ditentukan oleh sifat permintaan ke atas barang-barang yang diwujudkankannya.

### **Kurva Permintaan Perusahaan**

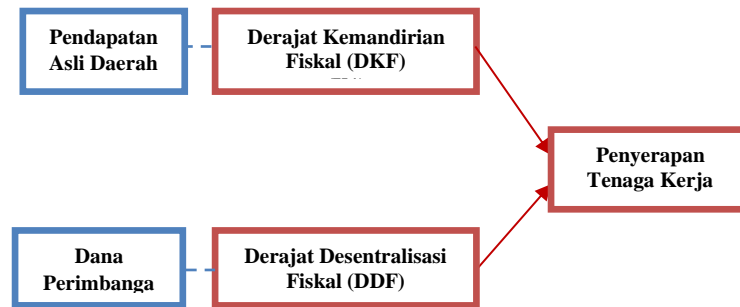
Payaman (1998) menyebutkan bagi suatu perusahaan dalam memutuskan untuk menambah ataupun mengurangi jumlah tenaga kerja harus memperkirakan: Pertama, perusahaan memperkirakan dari output yang akan diperoleh perusahaan sehubungan dengan penambahan seorang pekerja.  $\rightarrow$  Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal dari pekerja atau Marginal Physical Product Of Labor (MPP). Kedua, perusahaan memperhitungkan penambahan pendapatan yang dinamakan penerimaan maginal atau Marginal Revenue (MR) yang akan diperoleh perusahaan sehubungan dengan adanya tambahan MPP. Hal ini dapat diformulasirkan sebagai berikut :

$$MR = VMPL = MPPL \times P$$

Sedangkan jumlah yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan mempekerjakan tambahan tenaga kerja (VMPL) tadi adalah dalam bentuk upah atau wage (W). Bila tambahan MR lebih besar daripada W, maka mempekerjakan tambahan seorang tenaga kerja akan menambah keuntungan perusahaan. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan maka perusahaan akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar daripada W

### **Kerangka Pikir Penelitian**

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah dalam kerangka pelaksanaan kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah.



Gambar 1. Hubungan Variabel Penelitian

### Hipotesis Penelitian

1. Diduga bahwa Derajat Kemandirian Fiskal dan Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Diduga bahwa Derajat Kemandirian Fiskal dan Derajat Desentralisasi Fiskal secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah.

### III. METODE PENELITIAN

#### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain bukan dari hasil penyelidikan sendiri. Dengan demikian, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode “Library Research” atau Riset Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui dokumentasi, literatur, laporan, maupun publikasi lainnya dari dinas dan instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun instansi yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tahun penelitian selama 10 tahun yaitu tahun 2010-2019; dimana data untuk keperluan analisis disajikan dalam bentuk data kwartalan dengan metode Interpolasi menurut Insukindro, (1984:32) dengan formulasi sebagai berikut :

$$Q1 = \frac{1}{4} \{ (Qt - 4,5/12 (Qt - Qt-1)) \}$$

$$Q2 = \frac{1}{4} \{ (Qt - 1,5/12 (Qt - Qt-1)) \}$$

$$Q3 = \frac{1}{4} \{ (Qt + 1,5/12 (Qt - Qt-1)) \}$$

$$Q4 = \frac{1}{4} \{ (Qt + 4,5/12 (Qt - Qt-1)) \}$$

Dimana :

Q1, Q2, Q3, dan Q4 = kwartal 1, 2, 3 dan 4;

Qt = data tahun ke-t;

Qt-1 = data tahun sebelumnya (t-1).

#### Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Model Analisis Rasio dan Analisis Regresi Linier Berganda OLS (Ordinary Least Square) sebagai berikut:

1. Analisis Rasio, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kemandirian Fiskal (DKF)} = \text{PADt} / \text{TPDt} \times 100$$

Dimana:

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t;

TPDt = Total Penerimaan Daerah pada tahun t;

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)} = \text{DPt} / \text{TPDt} \times 100$$

Dimana:

TPDt = Total Penerimaan Daerah pada tahun t;

DPt = Dana Perimbangan pada tahun t;

2. Analisis Regresi Linier Berganda menurut Nachrowi, et.al, (2006) dengan formulasi:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

Sesuai keperluan, lebih spesifik maka model regresi linier berganda tersebut di atas dapat ditulis dalam bentuk semi log sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + U_i$$

Dimana:

Y = Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) per per tahun;

X1 = Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) (Rasio) per tahun;

X2 = Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) (Rasio) per tahun;

B0 = Konstanta;

B1 dan B2 = Koefisien Regresi;

U<sub>i</sub> = Variabel Pengganggu (Disturbance Error);

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent (X1 dan X2) terhadap variabel dependent (Y) sekaligus pengujian hipotesis digunakan uji statistik t (individual test) atau uji secara parsial dan uji statistik F (overall test) atau uji secara general dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % atau  $(\alpha) = 0,05$  dengan d.f = n-k-1.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t (individual test) atau uji secara parsial, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho :  $B_i = 0$ ; dimana (i = 1,2)

Ha :  $B_i \neq 0$ ; dimana (i = 1,2)

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan, antara nilai t-hitung (th) dengan t-tabel (ttab), atau membandingkan level of sig. dengan  $(\alpha) = 0,05$  dimana apabila:

- th > ttab, atau level of sig. <  $(\alpha) = 0,05$  maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variasi variabel bebas (Xi) dapat menerangkan variabel terikat (Yi) dan terdapat pengaruh dari variabel yang diuji.
- th < ttab, atau level of sig. >  $(\alpha) = 0,05$  maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variasi variabel bebas (Xi) tidak dapat menerangkan variabel terikat (Yi) dan tidak terdapat pengaruh dari variabel yang diuji.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F (simultan test) atau uji secara simultan, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho:  $B_i = 0$ ; dimana i = jumlah variabel bebas

Ha:  $B_i = \text{minimal satu koefisien} \neq 0$ ; dimana i = jumlah variabel bebas

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan, antara nilai F-hitung (Fh) dengan F-tabel

( $F_{tab}$ ), atau membanding level of sig. dengan ( $\alpha$ ) = 0,05 dimana apabila:

- $F_h > F_{tab}$ , atau level of sig.  $< (\alpha) = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variasi dari model regresi variabel bebas ( $X_i$ ) secara keseluruhan dapat menerangkan variabel terikat ( $Y_i$ ) dan terdapat pengaruh dari variabel yang diuji.
- $F_h < F_{tab}$ , atau level of sig.  $> (\alpha) = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variasi dari model regresi variabel bebas ( $X_i$ ) tidak dapat menerangkan variabel terikat ( $Y_i$ ) dan tidak terdapat pengaruh dari variabel yang diuji.

Sementara itu, untuk mengetahui besarnya sumbangan dari model regresi variabel bebas ( $X_i$ ) secara keseluruhan terhadap variasi perubahan nilai variabel terikat ( $Y_i$ ) digunakan nilai koefisien Determinasi ( $R^2$ ), dengan nilai mendekati 1, dimana semakin tinggi nilainya menunjukkan besarnya model regresi tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap variabel terikat, dan sisanya disumbangkan oleh variabel lain di luar analisis yang tergabung dalam variabel pengganggu (*disturbance error*),  $U_i$ .

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Regresi Berganda

Sebagaimana perhitungan diperoleh hasil analisis regresi dengan signifikansi 5 % atau ( $\alpha$ ) = 0,05 sebagai berikut :

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Independent Variable	Coefficients B	Std. Error	T	Sig.	Ket
Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) ( $X_1$ )	0,003	0,015	0,173	0,864	Tidak Signifikan
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ( $X_2$ )	0,017	0,005	3,256	0,002	Signifikan
Konstanta = 12,311					
Multiple R = 0,484 R Square = 0,235 N = 40 (Data Interpolasi) ( $\alpha$ ) = 0,05 Level of Sig. F = 0,007					

Selanjutnya, untuk memperjelas koefisien regresi pada hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 2 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### Koefisien Regresi

Nilai Koefisien Regresi variabel Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) ( $B_1$ ) sebesar 0,003 tidak signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05 ini berarti bahwa Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) ( $X_1$ ) pada tingkat keyakinan sebesar 95 % tidak mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ( $LnY$ ) di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai Koefisien Regresi variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ( $B_2$ ) sebesar 0,017 signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05 ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan dalam Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ( $X_2$ ) sebesar 1%, dapat meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja ( $LnY$ ) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,017%, dengan anggapan faktor lain bersifat konstan. Nilai Multiple Regression ( $R$ ) sebesar 0,484 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2010-2019 rendah atau hanya sebesar 48,40 %. Nilai  $R$  Square ( $R^2$ ) atau disebut koefisien determinasi sebesar 0,235 ini menunjukkan besarnya

sumbangan variabel bersama-sama Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2010-2019 sebesar 23,50% dan sisanya sebesar 76,50 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar analisis yang tergabung dalam variabel pengganggu (disturbance error),  $e_i$

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis model analisis Regresi Linear Berganda menggunakan uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan), sebagai berikut:

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara individual, dari semua variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ) dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel atau membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan atau ( $\alpha$ ) = 0,05 pada level of confidence sebesar 95 %, dengan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel dimana level of sig. untuk  $X_1$  sebesar 0,864 lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05 dan level of sig. untuk  $X_2$  sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05. Berdasarkan ketentuan uji ini, dinyatakan variabel bebas Derajat Kemandirian Fiskal (DKF)  $X_1$  tidak berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  berarti hipotesis ditolak, dan variabel bebas Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)  $X_2$  berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  berarti hipotesis diterima. Secara keseluruhan, hasil perhitungan regresi linier berganda, dengan menggunakan uji t (uji secara parsial) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh DKF terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  
Tingkat signifikansi dari variabel Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) ( $X_1$ ) dimana level of sig. untuk  $X_1$  sebesar 0,864 tidak signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05. ini berarti secara parsial Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah.
2. Pengaruh DDF terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  
Signifikansi dari variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ( $X_2$ ) dimana level of sig. untuk  $X_2$  sebesar 0,002 signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05. ini berarti secara parsial Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga di Kalimantan Tengah.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini didasarkan atas hasil uji statistik F (uji secara simultan) yang signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05 dimana level of sig. F sebesar 0,007 atau signifikan pada ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat sehingga  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  berarti hipotesis dapat diterima, karena terbukti kebenarannya. Secara simultan Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah, walaupun secara parsial Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) tidak berpengaruh tetapi Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh. Dengan demikian secara keseluruhan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima karena sebagian besar terbukti kebenarannya.



## V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sementara itu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah.
2. Secara simultan Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, G. 1987. *Increasing Minimum Wage: The Makro Economic Impacts*. Economic Policy Institute
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- Bappenas. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Boediono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS. 2004. *National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Sumarno Zain. 2003. Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Esmara. 1986, *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*. (Jurnal Elektronik) diakses 08 Oktober 2010.
- Indonesia. *UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Insukindro. 1984. *A Money Supply Model for Indonesia 1971-1984*. Occasional Paper, Faculty of Economic Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Jhingan ML. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Kamaluddin Rustian. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Balai Aksara.
- Mangkoesebroto Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi 3, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Mankiw, G.N. 2006. *Teori Makroekonomi*. 6th Edition. Nurmawan. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miller and Mainers. 1993. *Intermediate Microeconomics Theory, Issue, Applications*. McGraw Hill.tnc. Munandar Haris. 2010. Edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nachrowi, Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Nicholson. 2002. *Micro Economic*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Noorliana.2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Pemerintah Indonesia. *PPRI No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Prayitno Hadi. 1986. *Pengantar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gadjah Mada.
- Sanusi, B. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sekaran, U. 2009. *Research Methods For Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, M.P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, P. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1988. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Soediyono. 1981. *Ekonomi Makro: Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. Edisi Ke-empat. Yogyakarta. Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Soetrisno, L. 2002. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Sudradjat, M.S.W. 1984. *Mengenal Ekonometrika Pemula*. Bandung: ARMICO.
- Suffianor. 2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Palangka Raya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Tesis Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Suparmoko, M. 1987. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Suparmoko, M. 1990. *Pengantar Ekonomika Mikro*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gadjah Mada